

POST ISLAMISME : TELAAH POLITIK TURKI MODERN ERA ERDOGAN

Lutfi Rosyad Alfikri, Ahmad Sahide

1. Kajian Timur Tengan, Interdisciplinnary Islamic Studies, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl.Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281, Indonesia
2. Studi Timur Tengah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Yogyakarta, 55183, Indonesia

E-mail :

Lutfirosyadalfikri798@gmail.com ahmadsahideumy@gmail.com

Abstract

Turkey is one of the countries that adheres to a parliamentary and secular government system. The dynamics of Turkish political change fluctuate and continue to experience turmoil. This can be investigated at the time of the change in the government system that started from the monarchy to the Republic. Until the process of government embraced secular. Turkish secularism was imposed as a form of state anxiety and decline. It is because of this that a quarter of the world's territory is almost occupied. His character Mustafa Kemal Attatürk is considered the father of secularism. He later became an important figure in changing almost the entire flow of government and various policies that made Turkey a secular state. This means that there is an element of separation between the interests of the state and religion which was very strong in the Ottoman era. The Kemalist paradigm is total secularization, both in government and in life, in other words Turkey and upholds the concept of love for the homeland. In the discussion of this article, the topic of Turkish government is narrowed down by the Erdoan era. because according to the author's hypothesis in the era of Erdoan, the development of Islam in the government was growing rapidly.

Keywords: Post Islamism, Politics, Turkey, Erdogan

Abstrak

Turki adalah salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer dan sekuler, Dinamika perubahan politik Turki mengalami fluktuasi dan terus mengalami gejolak. Hal tersebut dapat ditelisik pada saat pergantian sistem pemerintahan yang bermula dari monarki menuju Republik. Hingga proses pemerintahannya menganut sekuler. Sekulerisme Turki diberlakukan sebagai bentuk kegelisahan dan kemunduran Negara. Karena hal inilah sepertempat wilayah dunia hampir dikuasai. Tokohnya Mustafa Kemal Attatürk dianggap sebagai bapak sekulerisme. Ia kemudian dijadikan sebagai tokoh penting dalam mengubah hampir seluruh alur pemerintahan serta berbagai kebijakan-kebijakan yang membuat Turki menjadi negara sekuler. Maknanya bahwa adanya unsur pemisahan antara kepentingan negara & agama yang sangat kental di Era Turki Utsmani. Paradigma Kemalis yakni sekulerisasi total, baik di tubuh pemerintahan maupun kehidupan dengan arti lain Turki dan menjunjung tinggi konsep cinta tanah air . Pada pembahasan artikel ini, topik pemerintahan Turki di sempitkan era Erdogan. sebab menurut Hipotesis penulis dimasa Erdogan lah perkembangan Islam di tubuh pemerintahan berkembang pesat.

Kata Kunci: Post Islamisme, Politik, Turki, Erdogan

1. Pendahuluan

Islam sebagai sebuah agama, tidak hanya mengatur urusan akhirat saja melainkan juga mengatur urusan dunia. Agama Islam, sudah diaplikasikan dalam keduniawian semenjak zaman Rasulullah SAW memimpin Kota Makkah. Meskipun kala itu masih banyak daerah-daerah yang belum terjamah ajaran Islam ataupun masih banyak daerah yang masyarakatnya belum memeluk Islam, namun nilai-nilai keIslaman yang di dakwahkan Nabi Muhammad SAW mampu merangkul segala kepentingan perpolitikan saat itu. Nabi Muhammad SAW menjalankan roda pemerintahan kala itu tidak lepas dari ajaran Islam, artinya perpolitikan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW secara tidak langsung dalam upaya menyebarkan ajaran Islam.

Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, perpolitikan Negara Islam dilanjutkan oleh para Khullafaurasyidin yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Para Khullafaurasyidin ini juga berusaha mempraktikkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, menjalankan roda pemerintahan dan juga menyebarkan ajaran Islam. Di era Khullafaurasyidin, wilayah kekuasaannya hampir merata di seluruh penjuru dunia, bahkan pada saat itu masuk sebagai Negara adidaya karena pada saat itu dunia digenggam oleh Islam, Romawi dan Persia. Selanjutnya adalah era dinasti, pada era ini Islam juga masih dijadikan landasan dalam bernegara dan secara tidak langsung berdampak pada banyaknya jumlah pemeluk agama Islam.

Beberapa kelompok Islam konservatif selalu melakukan genjatan senjata sehingga mengakibatkan ketakutan hingga Islam phobia pada beberapa kalangan non Islam. Sistem politik Timur tengah yang identik dengan kekerasan seperti itu ialah ISIS, Taliban,

Al-Qaeda dan sebagainya. Fenomena ini mengakibatkan Islam phobia. Maknanya bahwa ajaran Islam yang telah ada ini dirasa kurang relevan ketika dicampuradukkan dengan sistem pemerintahan. Partai AKP yang didirikan oleh presiden Recep Tayyip Erdogan beserta yang lain dengan mencoba untuk tetap menjalankan berbagai nilai ajaran Islam dalam batang tubuh pemerintahan Turki. Inilah yang kemudian diberi istilah dengan post Islamisme atas usulan dari Asef Bayat dan Olivier Roy. Gagasan baru ini dianggap sebagai suatu angin segar bagi mayoritas masyarakat Turki. Hal ini dikarenakan Negara Turki menganut sistem sekulerisme (Ahmad Junaidi: 2016) tanpa batas wajar sepanjang sejarah perjalanannya. Sekulerisme yang dianut ini dianggap melampaui batas karena telah diaplikasikan tidak hanya di tubuh pemerintahan negara Turki, melainkan diaplikasikan juga dalam kehidupan sehari-hari seperti pergaulan bebas, dibubarkannya madrasah-madrasah serta dilarangnya penggunaan simbol-simbol keagamaan di muka publik.

Selanjutnya adalah Periode zaman sekarang, meskipun wilayah di dunia sekarang sudah terkotak-kotak oleh hal administrasi yakni Negara akan tetapi eksistensi Islam untuk dijadikan landasan bernegara dinilai masih relevan. Di era kontemporer ini terdapat sebuah fenomena dengan istilah Post Islamisme. Post Islamisme menggabungkan nilai Islam dengan pilihan & kebebasan pada individu, demokrasi dan nilai modernitas. Post-Islamisme diaplikasikan dengan cara tetap mengakui sekuler dan penghapusan monopoli kebenaran agama. Secara sederhana nya, Islamisme diartikan sebagai Penggabungan agama dan tanggung jawab syariatnya, sedangkan

pos-Islamisme sendiri menekankan pada sikap keberagaman dan HAM.

Salah satu pengaplikasian post-Islamisme yang menurut peneliti adalah perpolitikan yang dilakukan oleh Erdogan, selaku presiden Turki saat ini. Erdogan dengan partai AKP nya mencoba untuk mengharmoniskan antara nilai-nilai Islam dengan pemerintahan. Erdogan dipandang peneliti sebagai sosok pembaharu dan juga sosok pembawa angin segar ditengah derasnya sekurelasi yang ada di Negara Turki. Meskipun dinilai wajar sebab partai AKP di doninasi aktivis Islam, tapi perlu di apresiasi sebab melawan gaya sekurelasi yang telah beredar luas di Negara Turki adalah bukan hal yang mudah terlebih lagi adanya intervensi dari Negara asing diantaranya dengan adanya upaya kudeta terhadap presiden Erdogan beberapa tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2013.

Post Islamisme ala Turki dianggap penulis sebagai upaya gerakan pembaharuan terhadap nilai2 ajaran Islam untuk dapat diaplikasikan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan yang relevan di zaman sekarang. Meskipun hal ini tidak sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bill Clinton bahwa negara yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang cenderung otoriter sekaligus berpeluang oligarki dirasa tidak akan tumbuh subur karena mengabaikan dua elemen penting yakni hak politik dan kebebasan sipil. Wacana penerapan kehidupan bernegara model barat yang cenderung sekuler dan menjunjung tinggi demokrasi pernah menjadi wacana melalui sebuah gerakan bernama The Arab Spring. The Arab Spring dimulai pada Januari 2011 yang diawali dari Negara Tunisia. Pada saat itu terdapat peristiwa pembakaran diri salah satu warga Tunisia yang merasakan kecewa akibat dari

ketidakpuasannya terhadap penggunaan fasilitas negara. Hal ini berlanjut hingga beberapa negara di kawasan Timur tengah. Melihat banyaknya fenomena yang telah disebutkan diatas, rasanya diperlukan sebuah gerakan Islam yang relevan untuk diterapkan saat ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait gerakan post Islamisme di masa pemerintahan Erdogan dan penerapannya. Tujuan penelitian ini yakni untuk lebih mendalami dan mengetahui terkait bagaimana penerapan post Islamisme di masa pemerintahan Erdogan.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Literatur review yang menjadi acuan penulis dalam menyusun kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan beberapa kajian pustaka yakni :

- a. Artikel yang disusun oleh Farid Senzai yang membahas terkait kaum Islamis dapat meninggalkan Islamisme, tetapi mereka tidak mungkin berhenti menjadi Muslim yang taat. Bagi Bayat, Islamisme dan post-Islamisme sering kali hadir secara bersamaan: “Di dunia banyak individu atau kelompok Muslim yang secara eklektik dan simultan menganut aspek kedua wacana tersebut. Munculnya post-Islamisme, sebagai tren nyata tidak harus dilihat sebagai akhir sejarah Islamisme. Ini harus dilihat sebagai kelahiran, dari keberangkatan kritis dari pengalaman Islamis, dari wacana dan politik yang berbeda secara kualitatif. Pada kenyataannya kita dapat menyaksikan operasi simultan dari Islamisme dan

pasca-Islamisme” (Bayat: 2013). Oleh karena itu umat Islam dapat dan secara bersamaan menganut baik Hizbullah di Lebanon, Al-Wasat di Mesir, dan Ennahda di bawah kepemimpinan Rashid Ghannoushi di Tunisia. Seperti yang telah kita lihat, pasca-Islamisme akan terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan realitas masyarakat Muslim.

- b. Artikel yang disusun oleh Mehmet Orhan membahas tentang kelompok aksi al-Qaeda yang didirikan sekitar tahun 2000 di Turki. Kelompok ini membangun gerakan otonom kecil di luar struktur kekuasaan dan aksi sosial dan politik yang lebih besar di Bingöl, sebuah kota Kurdi. Bentuk baru radikalisme kelompok, dengan instrumen sosialisasi lokal dan global serta repertoar kekerasannya, menghasilkan perpecahan organisasional, strategis, aksiologis, dan teleologis dengan gerakan Islam tradisional di wilayah tersebut.
- c. Artikel yang disusun oleh Ihsan Yilmaz membahas mengenai Turki yang telah dilihat sebagai kasus yang hampir unik sejauh menyangkut hubungan Islam-negara-sekularisme-demokrasi tetapi transformasi baru-baru ini dari Islamisme Turki ditambah dengan gejolak global di dunia pasca-9/11 telah membuat kasus Turki jauh lebih penting. Dinamika yang mempengaruhi perubahan kerangka normatif Islam Islamis Turki belum dianalisis secara rinci. Tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan politik Islam di Turki. Oleh karena itu, studi ini berusaha menganalisis faktor-faktor utama di balik kerangka normatif toleran yang baru muncul dari para pemimpin JDP yang dulunya Islamis. Setelah menunjukkan bahwa ada alasan historis yang muncul dari pengalaman Utsmaniyah tentang sekularisme dan demokrasi dan berargumentasi berdasarkan diskusi teoritis singkat tentang pluralitas Islamisme, makalah ini berpendapat bahwa Islamisme Turki selalu berbeda dari pengalaman Islamis lainnya.
- d. Artikel yang disusun oleh Selin Bengin membahas terkait gerakan anti-globalisasi pertama kali muncul di negara-negara Barat selama tahun 1990-an dan secara bertahap menyebar ke negara-negara lain. Makalah ini mencoba menelusuri bagaimana gerakan-gerakan ini muncul dan berkembang di Turki dan repertoar tindakan mereka, mengambil data dari artikel surat kabar dan wawancara mendalam. Gerakan anti-globalisasi muncul di Turki mengikuti difusi ide dari luar negeri melalui penerjemahan makalah ke dalam bahasa Turki dan partisipasi aktivis Turki, serikat pekerja, dan peneliti dalam pertemuan dan acara yang diselenggarakan di luar negeri. Sebagai hasil dari proses difusi ini, repertoar aksi gerakan anti-globalisasi di Turki dan negara-negara Barat lainnya serupa.
- e. Artikel yang disusun oleh Bannu & Anna mengenai Istilah post-Islamisme telah diterapkan secara luas untuk menunjukkan bahwa kita

sedang menyaksikan fase baru politik Islam di mana tujuannya bukan untuk menjadikan negara Islami tetapi untuk mengubah pengalaman hidup Islam. Apakah post-Islamisme berlaku untuk kasus Turki telah menjadi bahan perdebatan. Kami mendekati pasca-Islamisme di Turki menggunakan analitik geografis feminis yang mengalihkan fokus kami dari politik formal ke yang diwujudkan dan sehari-hari. Berdasarkan delapan kelompok fokus dengan laki-laki dan perempuan di Istanbul pada tahun 2013 dan 2014, kami menganalisis diskusi tentang reformasi pendidikan, kemungkinan politik agama dan perbedaan agama untuk menunjukkan bagaimana premis pasca-Islamisme bergantung pada (sering tidak berhasil) makalah atas beragam. Kami berpendapat bahwa solusi sehari-hari yang diwujudkan untuk pertanyaan-pertanyaan pasca-Islamisme sering merusak kategori-kategori itu sendiri (negara, masyarakat, agama dan sekularisme) yang menjadi dasar problematika pasca-Islam.

- f. Artikel yang disusun oleh Tedi Kholiludin mengenai Pos-Islamisme dinyatakan dalam gagasan fusi antara Islam (sebagai iman pribadi) dan kebebasan serta pilihan individu; dan Pos-Islamisme dikaitkan dengan nilai-nilai demokrasi dan aspek modernitas. Ide yang ingin diusung adalah bahwa Islam tidak memiliki jawaban untuk seluruh masalah sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, kata Bayat, Pos-Islamisme bukan hanya

Islam kompatibel dengan modernitas, tetapi kelangsungan hidup sebuah agama sangat tergantung pada pencapaian kompatibilitas ini.

3. Objek dan Metode Penelitian (jika artikel merupakan hasil riset).

Pada penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif dimana pendekatan yang dilakukan dengan alat ukur kepustakaan atau seringkali dikenal dengan istilah library research. Maksudnya penelitian kepustakaan hanya memanfaatkan sumber perpustakaan yang sesuai dengan tema yang diambil untuk memperoleh sebuah data. Penelitian kepustakaan dalam hal ini membatasi penelitian pada bahan yang ada pada perpustakaan saja tanpa melakukan terjun langsung di lapangan. Objek pada penelitian ini yakni beberapa karya ilmiah yang membahas terkait post Islamisme pada masa pemerintahan Erdogan. Fokus penelitian ini berkaitan dengan penerapan post islamisme yang dilakukan pada masa kebijakan Erdogan.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Post Islamisme

Tahun 2007, Asef Bayat seorang Profesor Sosiologi di Illionis University, menulis sebuah penelitian dengan judul "Making Islam Democratic: Social Movement and Post-Islamist", Ia selanjutnya mengenalkan istilah Pos-Islamisme. Gagasan tentang Pos-Islamisme itu sendiri sebetulnya telah dikenalkan pada tahun 1996 melalui sebuah esai "The Coming of a Post-Islamist Society (Asef Bayat: 2011). Bayat melanjutkan, Post Islamisme dinyatakan dalam sebuah gagasan fusi bahwa Islam (iman) dan kebebasan serta pilihan individu; dan Pos-Islamisme dihubungkan dengan

nilai yang ada di demokrasi dan pada aspek modernitas. Post-Islamisme menggabungkan nilai Islam dengan pilihan & kebebasan pada individu, demokrasi dan nilai modernitas. Kondisi tersebut sebagai bagian dari sebuah proyek. Hal inilah yang menjadi penekanan pos-Islamisme, untuk menggapai apa yang oleh para sarjana diistilahkan sebagai sebuah "modernitas alternatif". Pos-Islamisme diaplikasikan dengan cara tetap mengakui sekuler dan penghapusan monopoli kebenaran agama. Secara sederhana nya, Islamisme diartikan sebagai Penggabungan agama dan tanggung jawab syariatnya, sedangkan pos-Islamisme sendiri menekankan pada sikap keberagaman dan HAM (Asef Bayat: 2011).

Post Islamisme merupakan fenomena politik Islam yang dinamis sehingga tersebar dengan beragam karakter (Syahrir Karim, 2021). Post Islamisme dipandang oleh banyak ilmuwan berbeda dengan penganut Islamisme, dimana menurut pandangan dari Ahmad Dzakirin bahwa Post Islamisme yakni sebuah pemikiran dari kaum muslim serta sebuah gerakan politik yang sudah tidak lagi hanya memperjuangkan keyakinan syariat Islam saja ke dalam ideologi yang dianut sebuah negara, tetapi lebih pada upaya menjalankan nilai Islam di kehidupan dalam bermasyarakat (Ahmad Dzakirin: 2012). Hal ini juga dianggap sebagai pergeseran Islam yang simbolis-ideologis ke substansi-pragmatisme. Turki mengalami perubahan yang signifikan pada masa pemerintahan presiden Recep Tayyib Erdoğan. Erdoğan dinilai telah melakukan banyak gerakan-gerakan reformasi secara fundamental dan fenomenal. Ia menunjukkan kepada dunia internasional bahwa wajah Turki yang dianggap sebelah mata dan dikatakan sebagai The Sick Man of Europe (Poltak Partogi

Nainggolan: 2020) oleh orang luar adalah salah.

Turki dianggap bukanlah negara yang prospek untuk membangun kerjasama, namun sebenarnya hal itu salah. Turki membuka diri kepada negara lain, seperti halnya apa yang dilakukan oleh kelompok sekularis demokratis yang melarang suku Kurdi untuk berbicara dengan bahasa mereka. Tetapi kebijakan lain yang sudah dilakukan Erdoğan, dimana dia memberikan pintu terbuka bagi suku Kurdi untuk menghidupkan kembali warisan-warisan leluhur mereka. Hal ini dianggap sebagai cara elegan dalam menumbuhkan nilai-nilai keIslaman didalam kehidupan tanpa menggaungkan penerapan syariat Islam.

Partai politik yang ada di Turki berkompetisi ketat. Hal tersebut membuat kehidupan partai di Turki mulai menampakkan perkembangan ketika sebelumnya telah lama menganut pemerintahan kerajaan yakni dimasa Turki Utsmani. Sejak tahun 2002 partai-partai melakukan koalisi, karena alasan ketidak mampuan partai menciptakan perubahan yang signifikan. Hingga pada tahun 2002 diadakan pemilu yang membuat perubahan bagi Turki yakni berujung pada kemenangan tidak terduga oleh AKP. Partai berhaluan aktivis Islam memperoleh hasil suara terbanyak kursi sebanyak 363 kursi dari total sebanyak 550 kursi (Poltak Partogi Nainggolan: 2020) Hal tersebut menjadi salah satu sejarah terbesar dan juga pencapaian luar biasa bagi partai manapun di Turki. Kemenangan tersebut berujung pada perubahan yang mendasar didalam maupun diluar AKP maupun pemerintah yang terus bergulir hingga saat ini.

Post-Islamisme kerap kali disamakan dengan Islamisme, padahal kedua hal ini berbeda dari berbagai sudut pandang nya (Gili Argenti: 2019).

Islamisme sebenarnya bukan warisan pemerintahan Islam yang telah ada sebelumnya tetapi merupakan interpretasi politik kontemporer atas Islam yang didasarkan pada penciptaan sebuah tradisi. Adapun sebuah Pos-Islamisme hanya mungkin bisa dilakukan ketika seorang Islamis meninggalkan ideologi nya tersebut untuk selanjutnya mengaplikasikan ke ranah sosial zaman sekarang. Pos-Islamisme juga dilakukan dalam rangka membatasi pergerakan yang dilakukan para kaum Islamisme, baik secara sosial, arah gerak politik maupun aktivitas intelektual. Pos-Islamisme adalah sebagai upaya dalam rangka menjalankan keagamaan hak, iman dan juga pembebasan, Penekanan dalam hal ini adalah pada hak dari tugas dan kewajiban juga menjunjung nilai pluralitas menegaskan nilai kitab suci dan selalu berorientasi pada masayang akan datang (Tedi Kholiludi: 2016).

Islamisme digambarkan sebagai upaya untuk penggabungan agama dan tanggungjawab secara sosial, lebih lanjut Pos-Islamisme menekankan sikap keberagamaan dan juga Hak Asasi Manusia (HAM) (Tedi Kholiludi: 2016). HAM dalam hal ini tidak memandang agama apa yang di anut seseorang, melainkan semua keyakinan beragama seseorang harus mendapatkan perlindungan juga perlakuan yang sama rata. Konsep seperti ini dipandang sejalan dengan gaya hidup zaman sekarang diberbagai belahan dunia, artinya seseorang bisa dengan leluasa bergerak. kebebasan ini adalah harga mati di era demokrasi seperti sekarang ini, bahkan bisa dikatakan sebagai indikator kemakmuran warga di suatu Negara. Demokrasi Muslim ini membangkitkan warisan partai-partai Demokrat Kristen Eropa dalam hal ini adalah platform pemilihan yang berusaha mendominasi kalangan

menengah dengan mengintegrasikan nilai-nilai Muslim ke dalam tuntutan sosial ekonomi yang lebih luas. Ini bukan platform untuk reformasi agama atau konstruksi teoretis, melainkan produk dari politik di lapangan dan memberi dan menerima politik elektoral.

Ini telah terbentuk dalam proses politik melalui partai-partai Islam seperti Partai Keadilan dan Pembangunan Turki (AKP) dan partai-partai non-agama seperti Liga Muslim Pakistan (PML). Selain itu, ia menyediakan model untuk perubahan pragmatis dengan pengaruh yang lebih luas di seluruh dunia Muslim (Nasr, 2005). Oleh karena itu, para cendekiawan yang telah merenungkan apa yang telah terjadi di negara-negara seperti Iran dan Turki sejak tahun 1980-an menjadi semakin tertarik pada sejauh mana pasca-Islamisme dapat berakar di masyarakat Muslim lainnya (Senzai & Farid: 2021).

B. Politik Erdogan didalam kacamata Post Islamisme

Politik dan agama tidak dapat dipisahkan, politik sebagai bagian dari negara, sebaliknya agama juga dijadikan sebagai alat politik. Politisasi agama dalam lingkup negara menjadi sebuah fenomena dan dialektika yang terus bergerak. Binnaz Toprak berpandangan bahwa politik dan agama adalah dua hal yang saling melengkapi antara satu sama lain (Binnaz Toprak: 1999). Bila dalam perdebatan politik, agama sering kali menjadi hal yang "sensitif" untuk diperbincangkan. Hal inilah yang membuat politik dan agama semacam kurang begitu akurat ketika dijalankan secara bersama. Agama dianggap tidak dapat kompatibel dengan politik, sehingga keduanya bukan saling mengisi satu sama lain. Politik di Turki menunjukkan fenomena pos-Islamisme, dimana keterlibatan partai yang diwarnai oleh hal-hal yang berbau agama dan

perangkat pemerintah serta masyarakat sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan yang ada di negara.

Kondisi Turki melibatkan kedua hal tersebut yakni Islam dan demokrasi, bahkan proses sekularisasi juga tumbuh subur di Turki. Ketiga variabel, yakni Islam, demokrasi dan sekularisasi adalah harga mutlak bagi Negara Turki dalam menjalankan pemerintahan. Dialektika yang terjadi seperti ini mengartikan bahwa sesungguhnya Turki menerapkan sistem demokrasi sekuler tanpa menafikan ajaran-ajaran Islam didalamnya. Pemerintahan mempunyai kuasa besar dalam mengakomodir dan mengatur berbagai permasalahan negara, baik sisi agama, politik, ekonomi dan aspek lain. Sehingga negara adalah otoritas tertinggi dalam mengambil setiap kebijakan. Dalam pandangan pos-Islamisme hal ini menjadi sebuah realita dan fenomena bahwa sisi agama juga menjadi pertimbangan bagi pemerintah terkait pengambilan keputusan dalam beberapa kebijakan. Islam, Demokrasi dan sekularisasi berjalan berdampingan dalam kehidupan maupun ketika pembuatan kebijakan.

Turki mengalami perubahan dalam perjalanan politik yang dinilai sangat signifikan jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Kondisi tersebut menandakan apa yang dikenal dengan pos-Islamisme, yakni ketika Islam tidak lagi menjadi sebuah agama semata, tetapi mampu masuk ke berbagai ranah publik dan negara. Intinya praktek keagamaan Islam tidak stagnan perihal peribadatan, hanya berada pada sisi teologis dan ideologi semata. Tetapi juga dapat dilakukan sebuah dialektika dengan aspek nilai politik, nilai ekonomi, nilai agama dan kegiatan sosial yang ada di masyarakat. Kesuksesan ini tidak bisa lepas dari salah satu pendiri partai AKP yakni Erdogan. Recep

Tayyib Erdoğan memimpin Turki dinilai mengalami kemajuan yang begitu besar. Hal ini dapat diketahui ketika kebijakan yang dikeluarkan oleh Erdoğan setelah ia menjadi walikota Istanbul, hingga menjabat Perdana Menteri Turki, dan kemudian menjadi presiden Turki dalam kurun waktu tersebut. Keadaan Turki mengalami signifikansi yang terus membaik, baik dari segi politik, ekonomi, budaya hingga aspek lain. Hal ini tentu mengejutkan kalangan barat, karena beberapa kali partai AKP memenangkan Pemilu.

Ketika memimpin, Erdogan telah mengambil langkah yang strategis dan berbeda dari pemimpin sebelumnya dalam hal politik, sosial maupun ekonomi. Di antaranya, Erdogan melakukan amendemen konstitusi yang ada, menghapus perihal hukuman mati, memperhatikan pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan juga membuka komunikasi yang lebih hangat dengan kelompok-kelompok minoritas seperti kelompok Kurdi. Erdogan dicatat sebagai salah satu pemimpin yang beragama Islam dimana dia dengan berani menolak permintaan presiden AS pada saat itu yakni George W Bush, dimana pada saat itu Negara AS meminta agar di Negara Turki dibangun sebuah pangkalan militer bagi Negara Amerika dan Sekutu ketika perang melawan presiden Saddam Hussen pada tahun 2003. Hal tersebut terbukti mendapatkan apresiasi dari warga Turki kepada presiden Erdogan yakni dengan dukungan suara yang banyak menjadi Perdana Menteri 3 periode, dan juga berhasil mengubah konstitusi Negara Turki yang selama ini berjalan melalui referendum dari sistem parlementer ke sebuah sistem presidensial. Kesuksesan Erdogan dalam hal sektor ekonomi, sosial dan politik dinilai telah mengangkat namanya sebagai "Bapak Turki era Modern", yang sejajar bahkan dapat dikatakan melebihi Mustafa

Kemal Attaturk sebagai founding father Negara Republik Turki.

Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) atau lebih dikenal dengan Partai Keadilan dan Pembangunan di deklarasikan pada tanggal 14 Agustus 2001 (The Editors of Encyclopaedia Britannica: 2021) oleh para kader partai yang dipengaruhi seorang politikus Necmettin Erbakan (Arrasyidin Akmal Domo, Nurhasanah Bakhtiar, Zarkasih: 2018). Selain itu, Ia juga dianggap sebagai guru politik para kalangan warga Muslim Turki. Kelahiran AKP tidak lepas dari perjuangan dan komitmen Erdoğan bersama para rekannya yang memiliki visi dan misi sama untuk menjadikan partai politik sebagai wadah dalam membangun branding politik yang moderat dan elegan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Islam tanpa menimbulkan konflik dengan pemerintah. Berdasarkan keyakinan bahwa partai Islam adalah partai yang mampu memposisikan ajaran yang ada didalam Al-Quran maupun didalam Hadits dalam hal bentuk prinsip dasar yang cakap dalam mengatur sebuah Negara dan kehidupan masyarakat. Inilah yang dijalankan oleh partai AKP, dimana mereka berjuang demi tegaknya keadilan sosial mengakui nilai-nilai keagamaan, memenuhi kesejahteraan masyarakat, menjamin kebutuhan mereka terhadap dunia pendidikan dan dunia kesehatan, serta juga mendorong potensi yang ada di negaranya.

AKP yang digawangi oleh Recep Tayyip Erdoğan dapat dikatakan sebagai aktor "krusial" yang memberikan warna baru dalam politik Turki. Dalam pandangan Ernest Geller, Erdoğan adalah gerakan ketiga Islamis atau yang dikenal dengan pos-Islamisme setelah Ikhwanul Muslimin dan Quthbisme. AKP menjadi salah satu model demokrasi di Negara yang memiliki konsep penegakan syariat Islam. AKP

lebih lanjut ingin menunjukkan bahwa mereka mampu berkompetisi dalam kancah politik nasional, khususnya dalam merepresentasikan nilai-nilai keIslaman yang mereka perjuangkan dan anut ditengah arus sekuler radikal yang sudah tertanam kuat di Negara Turki.

Selain itu, AKP sesungguhnya melalui berbagai hambatan yang tidak mudah, namun juga melalui proses panjang sejarah yang melibatkan banyak entitas. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaruh partai bertendensi Islam yang didirikan oleh Necmettin Erbakan yang mempunyai massa yang cukup besar dan cenderung konfrontatif dengan rezim yang berkuasa pada saat itu. Erdoğan mendeklarasikan bahwa AKP bukanlah partai politik poros religius. Tokoh AKP selain Erdoğan yang berperan penting dalam pendirian dan perjuangan partai yakni Abdullah Gul, disamping para kader dan simpatisan partai lainnya yang beragama non Islam. AKP memiliki gebrakan dan inovasi dalam kancah panggung perpolitikan negara Turki. Partai ini ingin menunjukkan kepada dunia internasional maupun ranah regional. Secara tidak langsung hal ini menggambarkan bahwa Islam mampu mengakomodir dan masuk dalam struktur pemerintah, bukan kalangan Islamis yang cenderung memaksakan apa yang mereka usung tentang penegakan isu khilafah Islamiyyah. Tetapi, dalam hal ini AKP menawarkan pendekatan berbeda yakni mampu mengakomodir semua kalangan tanpa menafikan kelompok tertentu, baik kalangan non-Islam, ataupun kalangan ateisme hingga sekuler.

AKP dianggap sebagai partai "kompetitor" baru dalam panggung politik Turki, lewat gebrakannya mampu menyedot perhatian rakyat Turki dan mempunyai andil dalam dinamika politik Turki. Hal ini menandakan

bahwa partai Islam bukan lagi sesuatu yang menakutkan dan tidak mendapat posisi strategis dalam pemerintahan. AKP mencoba menghapus stigma atas Islam itu sendiri dan sedikit demi sedikit membantah perspektif yang salah atas hal tersebut, serta membangun branding bahwa partai yang berideologi Islam juga mampu memberikan perubahan yang baik didalam tubuh pemerintahan. AKP terus melakukan inovasi dan evaluasi selama kurun waktu 2002 hingga saat ini. Sebagai partai yang mempunyai massa yang besar dan anggotanya banyak menempati di parlemen. AKP cenderung berpikir untuk menerapkan kinerja yang sesuai dengan arahan dan amanah undang undang. Meski tidak terlepas dari apa yang diperintahkan oleh presiden Erdoğan yang juga menjabat sebagai ketua AKP. AKP juga menjadi salah satu "gebrakan" atas stagnasi politik. Partai ini menjawab tantangan atas kebutuhan demokratisasi didalam tubuh Islamis. Meski secara formalitas partai ini berlatar Islamis, tetapi anggota didalamnya pun yakni politikus dan petinggi partai perempuan yang tidak mengenakan busana Muslimah. AKP menjadi semacam ruang terbuka bagi siapapun dari berbagai kalangan untuk mengemukakan aspirasi, memiliki visi yang sama dalam membangun Turki modern dan demokratis, namun tetap menghormati nilai-nilai agama.

AKP membuat sebuah konsep sekularisme baru yaitu dengan agama seseorang maka dapat dengan leluasa menjalankan ritual keagamaan keyakinan lain. Mereka mencoba menormalkan dan menginstitutionalisasi pada satu bentuk pemerintahan yang selanjutnya termanivestasi dalam pembuatan perundang-undangan. Pos-Islamisme dinilai dapat mewakili sebuah upaya meleburkan keagamaan dan kebebasan

di era modern sekarang. Memang dinilai nilai-nilai Post Islamisme adalah upaya membalik prinsip dasar Islamisme diatas kepentingan kelompok sendiri dengan menekankan pluralitas dari suara otoritatif tunggal. Turki berperan penting di kancah internasional diantaranya beberapa kebijakan berseberangan dengan Negara Amerika, hal ini semakin menunjukkan secara jelas bahwa negara Turki merupakan negara yang penting dan strategis secara demografis. Hal ini juga dianggap sebagai upaya dalam menangani krisis iman pada masyarakat Turki, sebab Turki sedang tahap proses sekularisasi yang keblabasan. Konsep Nasionalisme yang digaungkan oleh Mustafa Kemal Attartuk seharusnya menjadi ideal ketika nilai-nilai keIslaman turut berjalan berdampingan.

Nasionalisme yang dicita-citakan oleh Mustafa Kemal Attartuk pada kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, semenjak kematiannya justru Turki jatuh pada kemunduran moral diantaranya adalah pemisahan kegiatan keagamaan dari pemerintahan justru berdampak pada kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat Turki pada saat itu hingga Tahun 1949 an, aktivitas-aktivitas keIslaman mulai dihidupkan kembali. Penghidupan nilai-nilai Islam dapat dilihat dari pencabutan pelarangan Haji dan dibukanya kembali madrasah-madrasah yang mengajarkan pelajaran keagamaan.

5. Kesimpulan

AKP dianggap sebagai partai "kompetitor" baru dalam panggung politik Turki, lewat gebrakannya mampu menyedot perhatian rakyat Turki dan mempunyai andil dalam dinamika politik Turki. Hal ini menandakan bahwa partai Islam bukan lagi sesuatu yang menakutkan dan tidak mendapat

posisi strategis dalam pemerintahan. AKP mencoba menghapus stigma atas Islam itu sendiri dan sedikit demi sedikit membantah perspektif yang salah atas hal tersebut, serta membangun branding bahwa partai yang berideologi Islam juga mampu memberikan perubahan yang baik didalam tubuh pemerintahan. AKP terus melakukan inovasi dan evaluasi selama kurun waktu 2002 hingga saat ini. Sebagai partai yang mempunyai massa yang besar dan anggotanya banyak menempati di parlemen. AKP cenderung berpikir untuk menerapkan kinerja yang sesuai dengan arahan dan amanah undang-undang. Meski tidak terlepas dari apa yang diperintahkan oleh presiden Erdoğan yang juga menjabat sebagai ketua AKP.

AKP juga menjadi salah satu "gebrakan" atas stagnasi politik. Partai ini menjawab tantangan atas kebutuhan demokratisasi didalam tubuh Islamis. Meski secara formalitas partai ini berlatar Islamis, tetapi anggota didalamnya pun yakni politikus dan petinggi partai perempuan yang tidak mengenakan busana Muslimah. AKP menjadi semacam ruang terbuka bagi siapapun dari berbagai kalangan untuk mengemukakan aspirasi, memiliki visi yang sama dalam membangun Turki modern dan demokratis, namun tetap menghormati nilai-nilai agama. AKP membuat sebuah konsep sekularisme baru yaitu dengan agama seseorang maka dapat dengan leluasa menjalankan ritual keagamaan keyakinan lain. Mereka mencoba menormalkan dan menginstitutionalisasi pada satu bentuk pemerintahan yang selanjutnya termanivestasi dalam pembuatan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Argenti, Gili. 2019. "Post Islamisme Turki Studi Praksis Politik Adalet Ve Kalkinma Partisi (AKP)", dalam *Jurnal Politikom Indonesiana*, Volume 4, Nomor 1.
- Belhaj, Abdessamad, Asef Bayat. 2015. "Post Islamisme The Changing Faces Of Political Islam, Movements in Turkey", *Journal of Church and State*, Volume 57, Issue 2.
- Domo, Arrasyidin Akmal, Nurhasanah Bakhtiar, Zarkasih. 2018. "Revolusi Sosial Masyarakat Turki: Dari Sekularisme Attatur Menuju Islamisme Erdogan". *Jurnal Sosial Budaya*, Volume 15, Nomor 2.
- Dzakirin, Ahmad. 2012. "Kebangkitan Post-Islamisme : Analisis Strategi AKP Turki Memenangkan Pemilu". Solo : Era Intermedia.
- Ervan Handoko, "Pengawal Sekularisme, Erdogan, dan Kudeta", dalam <https://internasional.kompas.com/read/2016/07/16/14141581/pengawal.sekularisme.erdogan.dan.kudeta?page=all>, diakses tanggal 25 Desember 2021, Pukul 21:00.
- Ghani, Abdul. 2019. "Post-Islamisme : Ideological Delusions and Sociological Realities", *Contemporary Arab Affairs*, Volume 12, Nomor 3.
- Gökarıksel, Banu, Anna Secor. 2017. "The post-Islamist problematic:

- questions of religion and difference in everyday life". *Social & Cultural Geaography*, Vol 18 Issues 5.
- Junaidi, Ahmad. 2016. "Kebijakan Politik Recep Tayyib Erdogan dan Islamisme Turki Kontemporer". In *Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Volume 6 Nomor 1.
- Kholiludi, Tedi. 2016. "Islamisme, Pos-Islamisme dan Islam Sipil: Membaca Arah Baru Gerakan Islam". Volume 3 Nomor 1.
- Kholiludin, Tedi. 2016. "Islamisme, Pos-Islamisme dan Islam Sipil: Membaca Arah Baru Gerakan Islam". *Jurnal Iqtisad*, Volume 10 Nomer 1.
- Mukti, Ali. 1994. "Islam & Sekulerisme di Turki Modern". Jakarta: Djambatan.
- Othman, Muhammad Atiullah. *Post-Islamisme dan Pasca Islamisme dalam Gerakan Islam masa kini*.
- Poltak Partogi Nainggolan. 2020. "Erdogan & Turki sebagai kekuatan baru di Timur Tengah, Bidang Hubungan Internasional". *Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XII, No. 16/II/Puslit/Agustus/2020.
- Purnama Hidayatullah. 2020. "Post Islamisme di Pusat Islam", dalam <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/18513/08.%20naskah%20publikasi.pdf?sequence=11&isAllowed=y>, dikases tanggal 24 Desember 2021, pukul 20:00.
- Sahide, Ahmad. 2019. "The Arab Spring, tantangan dan harapan demokratisasi". Yogyakarta: Kompas.
- Selin Bengi. 2010. "The Rise of a Social Movement: The Emergence of Anti-Globalization". *Turkish Studies*. Volume 11, Issue 2.
- Senzai & Farid, *Post-Islamism in Action*, <http://oxfordIslamicstudies.com/>, diakses tanggal 28 Desember 2021, pukul 21:00.
- Syahrir Karim. 2021. "Post-Islamisme: Memahami Aksi Politik Islam Kontemporer". Dalam *Jurnal Politik Profetik* Volume 9, No. 1.
- The Editors of *Encyclopaedia Britannica*, "History of Justice and Development Party", dalam <http://www.akparti.org/eng>, diakses tanggal 24 Desember 2021, pukul 22:00.
- Toprak, Binnaz. 1999. "Islam dan Perkembangan Politik di Turki". Yogyakarta.
- Yilmas, Ihsan, *Beyond*. 2011. "Post-Islamism: Transformation of Turkish Islamism Toward". *Civil Islam' and Its Potential Influence in the Muslim World*, *European Journal* Vol. 4. No 1.